



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)



**Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi**

Untuk

Tahun 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat **Allah Subhanahu wa Ta'ala**, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya sehingga **Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi** dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk **pertanggungjawaban kinerja** atas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Bappeda Provinsi Jambi selama Tahun Anggaran 2025, serta sebagai implementasi **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** sebagaimana diatur dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014**. Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang berlaku, khususnya **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Jambi, dan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025**.

Tahun Anggaran 2025 merupakan **tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026**, sekaligus menjadi **masa transisi perencanaan pembangunan daerah** menuju RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Dalam konteks tersebut, Bappeda Provinsi Jambi tetap berkomitmen mendukung pencapaian **Misi 1**, yaitu *“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan”*.

Sejalan dengan misi tersebut, fokus kinerja Bappeda Provinsi Jambi pada Tahun 2025 diarahkan pada penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan akuntabel. Dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**, Bappeda Provinsi Jambi menetapkan **dua sasaran strategis**, yaitu:

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.
2. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima Dan Akuntabel

Melalui pencapaian sasaran strategis tersebut, Bappeda Provinsi Jambi berupaya memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah berjalan secara sistematis, berbasis data, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Laporan Tahunan ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja, baik keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi, sebagai

bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi.

Akhir kata, diharapkan **Laporan Tahunan Tahun 2025 Bappeda Provinsi Jambi** dapat memberikan informasi yang komprehensif dan akuntabel mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja pada masa mendatang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan dan peningkatan kualitas perencanaan serta akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Jambi di masa yang akan datang.

Jambi, Januari 2026.

Kepala Bappeda,

Ir. AGUS SUNARYO, M,SI

Pembina Utama Madya

NIP. 196608141993031004

A. PENDAHULUAN.

Perencanaan merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan tindakan yang tepat melalui serangkaian pilihan kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Proses perencanaan pembangunan daerah meliputi empat tahapan utama, yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, serta evaluasi pelaksanaan rencana. Rencana yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) perangkat daerah, yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana tersebut senantiasa diikuti dengan proses pengendalian dan evaluasi. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan salah satunya dituangkan dalam Laporan Tahunan, yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik oleh perangkat daerah.

Bappeda Provinsi Jambi telah menyusun Laporan Tahunan Tahun 2025 yang menggambarkan capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada masing-masing bidang, termasuk realisasi fisik dan keuangan, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, serta pencapaian indikator kinerja dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 dan RENSTRA Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Bappeda Provinsi Jambi, Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia; perencanaan perekonomian dan sumber daya alam; perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; serta fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan Bappeda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan anggaran, kapasitas aparatur rencana, serta dinamika kondisi ekonomi daerah, nasional, dan global. Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Jambi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas

perencanaan melalui penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan peran kelembagaan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

B. REALISASI SERAPAN ANGGARAN 2025.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, realisasi serapan anggaran menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana perencanaan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, total anggaran murni yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 35.797.320.437,-. Anggaran ini disusun berdasarkan rencana kerja perangkat daerah yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal yang tersedia. Namun, dalam perjalanannya, pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme Anggaran Perubahan, seiring dengan adanya kebijakan efisiensi dan penyesuaian fiskal yang harus ditempuh.

Sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebijakan nasional dan kondisi fiskal daerah, dilakukan efisiensi anggaran (*pemotongan anggaran*) sebesar Rp.6.061.330.368,-. Kebijakan efisiensi ini merupakan langkah strategis yang ditempuh untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, meningkatkan efektivitas belanja, serta mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih fokus pada kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka sisa anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp 29.735.990.069,-. Anggaran setelah perubahan inilah yang selanjutnya menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan program sepanjang tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan pagu anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, baik dari sisi output maupun outcome.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, tercatat bahwa realisasi serapan anggaran mencapai Rp 27.025.588.707,-. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang tersedia setelah perubahan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dari sisi persentase, realisasi keuangan tersebut setara dengan 90,89%, yang mencerminkan tingkat serapan anggaran yang sangat baik dan berada pada kategori tinggi.

Sementara itu, dari aspek realisasi fisik, capaian kinerja tercatat **sebesar 98,03%**. Persentase realisasi fisik yang lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana

kerja yang ditetapkan, baik dari sisi volume pekerjaan, capaian output, maupun penyelesaian tahapan kegiatan. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Meskipun demikian, pada akhir Tahun Anggaran 2025 masih terdapat sisa anggaran belanja atau yang dikenal sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.2.710.401.362,-. Keberadaan SiLPA ini tidak serta-merta mencerminkan kinerja yang kurang optimal, melainkan merupakan konsekuensi dari berbagai faktor administratif, kebijakan, dan dinamika pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh perangkat daerah.

Jika ditinjau lebih lanjut, SiLPA terbesar berasal dari komponen Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan nilai sebesar Rp.1.435.892.663,-. Sisa anggaran pada komponen ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya formasi jabatan yang belum terisi sepenuhnya, mutasi dan pensiun pegawai yang terjadi di tengah tahun anggaran, serta penyesuaian terhadap kebijakan penggajian dan tunjangan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan tidak seluruhnya terealisasi hingga akhir tahun.

Selanjutnya, SiLPA terbesar kedua terdapat pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan nilai sebesar Rp 601.562.339,-. Tidak optimalnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan oleh adanya kebijakan penghentian pendanaan untuk kegiatan yang merupakan bagian dari Program BioCF ISFL pada akhir tahun. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan beberapa sub-kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan, sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Akibatnya, sebagian anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Kondisi serupa juga terjadi pada SiLPA terbesar ketiga, yaitu pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan nilai sisa anggaran sebesar Rp.352.156.871,-. Sama halnya dengan bidang Perekonomian dan SDA, realisasi keuangan pada kegiatan ini tidak optimal karena adanya penghentian pendanaan Program BioCF ISFL di akhir tahun anggaran. Penghentian pendanaan tersebut menyebabkan beberapa kegiatan yang dirancang sebagai bagian dari sinergi program tidak dapat dilanjutkan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran.

Meskipun terdapat sisa anggaran pada beberapa kegiatan strategis, secara keseluruhan kinerja pengelolaan anggaran Tahun 2025 dapat dinilai sangat baik. Tingginya realisasi fisik menunjukkan bahwa substansi program dan kegiatan tetap berjalan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Di sisi lain, realisasi keuangan yang mencapai hampir 91% mencerminkan efektivitas pengelolaan belanja serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

Keberadaan SiLPA dalam konteks ini justru mencerminkan adanya pengendalian anggaran yang prudent, di mana perangkat daerah tidak memaksakan realisasi belanja ketika kondisi kebijakan dan pendanaan tidak memungkinkan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

Ke depan, hasil evaluasi atas realisasi anggaran Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya. Pembelajaran dari dinamika Program BioCF ISFL, khususnya terkait ketergantungan pendanaan eksternal, menjadi catatan strategis agar ke depan perencanaan kegiatan dapat lebih adaptif dan memiliki skema mitigasi risiko yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 telah menunjukkan kinerja yang solid, terukur, dan bertanggung jawab. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rekapitulasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Belanja Daerah APBD Provinsi Jambi Tahun 2025 posisi Desember 2025 menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sepanjang tahun anggaran berjalan. Secara umum, pelaksanaan belanja daerah menunjukkan tingkat realisasi yang cukup baik, baik dari sisi keuangan maupun fisik, sebagai hasil dari perencanaan, pengendalian, dan monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan. Laporan ini menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran, mengidentifikasi sisa anggaran yang masih tersedia, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Rekapitulasi LPPK Tahun 2025, Posisi Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
BAPPEDA PROVINSI JAMBI

REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEGIATAN BELANJA DAERAH APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025
POSISI : DESEMBER 2025

BAPPEDA

No	Program / Kegiatan	Anggaran APBD			Jenis Belanja				Anggaran Belanja	Realisasi Jenis Belanja				Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		Murni	Perubahan	Setelah Perubahan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer				
1	2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		191.327.630	53.583.273	244.910.903	244.910.903	0	0	0	244.910.903	238.365.794	0	0	0	238.365.794	97,33	100,00	6.545.109
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.139.970	(10.945.370)	27.194.600	27.194.600	0	0	0	27.194.600	27.194.600	0	0	0	27.194.600	100,00	100,00	0
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	36.638.520	(2.607.800)	34.030.720	34.030.720	0	0	0	34.030.720	32.145.960	0	0	0	32.145.960	94,46	100,00	1.884.760
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.283.000	73.393.083	93.676.083	93.676.083	0	0	0	93.676.083	89.302.434	0	0	0	89.302.434	95,33	100,00	4.373.649
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.266.140	(6.256.640)	90.009.500	90.009.500	0	0	0	90.009.500	89.722.800	0	0	0	89.722.800	99,68	100,00	286.700
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.483.060.561	24.317.300	14.507.377.861	14.507.377.861	0	0	0	14.507.377.861	13.069.560.998	0	0	0	13.069.560.998	90,09	100,00	1.437.816.863
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.300.646.061	(0,31)	14.300.646.060,69	14.300.646.060,69	0	0	0	14.300.646.061	12.864.753.398	0	0	0	12.864.753.398	89,96	100,00	1.435.892.663
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	182.414.500	24.317.300	206.731.800	206.731.800	0	0	0	206.731.800	204.807.600	0	0	0	204.807.600	99,07	100,00	1.924.200
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95.160.000	-95.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	95.160.000	(95.160.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.699.539.203	(1.414.406.620)	1.285.132.583	416.786.467	868.346.116	0	0	1.285.132.583	409.095.531	862.070.400	0	0	1.271.165.931	98,91	99,81	13.966.652
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.564.135	(44.801.425)	29.762.710	29.762.710				29.762.710	29.618.816				29.618.816	99,52	100,00	143.894
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.095.611.116	(115.877.900)	979.733.216	111.387.100	868.346.116	0	0	979.733.216	106.335.300	862.070.400	0	0	968.405.700	98,84	100,00	11.327.516
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.315.200	(40.315.200)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.481.309.252	(1.205.936.595)	275.372.657	275.372.657	0	0	0	275.372.657	273.141.415	0	0	0	273.141.415	99,19	99,19	2.231.242
5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.739.500	(7.475.500)	264.000	264.000	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	264.000
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		862.591.782	1.202.166	863.793.948	863.793.948	0	0	0	863.793.948	773.383.393	0	0	0	773.383.393	89,53	100,00	90.410.555
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.101.320	12.999.999,90	367.101.319,90	367.101.319,90	0	0	0	367.101.320	279.761.193	0	0	0	279.761.193	76,21	100,00	87.340.127
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	508.490.462	(11.797.834)	496.692.628	496.692.628,00	0	0	0	496.692.628	493.622.200	0	0	0	493.622.200	99,38	100,00	3.070.428
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		1.092.636.200	(86.251.200)	1.006.385.000	1.006.385.000	0	0	0	1.006.385.000	978.585.800	0	0	0	978.585.800	97,24	100,00	27.799.200

TAHUN 2025

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
BAPPEDA PROVINSI JAMBI**

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.000.000	0	94.000.000	94.000.000	0	0	0	94.000.000	89.593.600	0	0	0	89.593.600	95,31	100,00	4.406.400
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	403.159.200	0	403.159.200	403.159.200	0	0	0	403.159.200	380.684.200	0	0	0	380.684.200	94,43	100,00	22.475.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.345.000	(41.790.000)	84.555.000	84.555.000	0	0	0	84.555.000	84.555.000	0	0	0	84.555.000	100,00	100,00	0
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.132.000	(44.461.200)	424.670.800	424.670.800	0	0	0	424.670.800	423.753.000	0	0	0	423.753.000	99,78	100,00	917.800
II. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN																	
1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		2.729.999.901	(1.379.810.065)	1.350.189.836	1.350.189.836	0	0	0	1.350.189.836	1.201.218.388	0	0	0	1.201.218.388	88,97	93,21	148.971.448
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	626.051.608	(226.351.868)	399.699.740	399.699.740	0	0	0	399.699.740	308.032.300	0	0	0	308.032.300	77,07	77,07	91.667.440
2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	180.479.999	(37.291.973)	143.188.026	143.188.026	0	0	0	143.188.026	143.188.010	0	0	0	143.188.010	100,00	100,00	16
3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100.311.850	(52.597.000)	47.714.850	47.714.850	0	0	0	47.714.850	47.713.740	0	0	0	47.713.740	100,00	100,00	1.110
4	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.159.934.400,1	(1.081.095.400)	78.839.000	78.839.000	0	0	0	78.839.000	78.175.000	0	0	0	78.175.000	99,16	100,00	664.000
5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	663.222.043,9	17.526.176	680.748.220	680.748.220	0	0	0	680.748.220	624.109.338	0	0	0	624.109.338	91,68	100,00	56.638.882
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		326.000.750	(204.739.970)	121.260.780	121.260.780	0	0	0	121.260.780	113.958.101	0	0	0	113.958.101	93,98	95,21	7.302.679
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	63.092.840	(12.159.110)	50.933.730	50.933.730	0	0	0	50.933.730	45.119.701	0	0	0	45.119.701	88,59	88,59	5.814.029
2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	187.157.660	(116.830.610)	70.327.050	70.327.050	0	0	0	70.327.050	68.838.400	0	0	0	68.838.400	97,88	100,00	1.488.650
3	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	75.750.250	(75.750.250)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang		918.000.000	(428.684.670)	489.315.330	489.315.330	0	0	0	489.315.330	485.010.820	0	0	0	485.010.820	99,12	99,80	4.304.510
1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	174.765.718	(173.765.718)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.000.000
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	668.738.382	(204.671.952)	464.066.430	464.066.430	0	0	0	464.066.430	461.689.320	0	0	0	461.689.320	99,49	100,00	2.377.110
3	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	74.495.900	(50.247.000)	24.248.900	24.248.900	0	0	0	24.248.900	23.321.500	0	0	0	23.321.500	96,18	100,00	927.400
4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan		43.999.250	(43.999.250)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	43.999.250	(43.999.250)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0

TAHUN 2025

**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
BAPPEDA PROVINSI JAMBI**

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI																	
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan		2.233.000.000	(917.725.472)	1.315.274.528	1.315.274.528	0	0	0	1.315.274.528	1.295.709.392	0	0	0	1.295.709.392	98,51	100,00	19.565.136
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.590.500	(87.590.500)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	665.002.000	(90.919.000)	574.083.000	574.083.000	0	0	0	574.083.000	572.419.193	0	0	0	572.419.193	99,71	100,00	1.663.807
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	102.576.100	(102.576.100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	672.724.300	(271.887.700)	400.836.600	400.836.600	0	0	0	400.836.600	388.896.491	0	0	0	388.896.491	97,02	100,00	11.940.109
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	423.947.300	(284.193.580)	139.753.720	139.753.720	0	0	0	139.753.720	133.792.500	0	0	0	133.792.500	95,73	100,00	5.961.220
6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	281.159.800	(80.558.592)	200.601.208	200.601.208	0	0	0	200.601.208	200.601.208	0	0	0	200.601.208	100,00	100,00	0
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan		6.087.330.560	(870.702.560)	5.216.628.000	5.216.628.000	0	0	0	5.216.628.000	4.615.065.661	0	0	0	4.615.065.661	88,47	91,48	601.562.339
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.762.110.560	(870.702.560)	1.891.408.000	1.891.408.000	0	0	0	1.891.408.000	1.855.700.730	0	0	0	1.855.700.730	98,11	100,00	35.707.270
2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	673.700.000	0	673.700.000	673.700.000	0	0	0	673.700.000	443.188.878	0	0	0	443.188.878	65,78	65,78	230.511.122
3	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1.054.000.000	0	1.054.000.000	1.054.000.000	0	0	0	1.054.000.000	839.869.044	0	0	0	839.869.044	79,68	79,68	214.130.956
4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	654.000.000	0	654.000.000	654.000.000	0	0	0	654.000.000	550.079.481	0	0	0	550.079.481	84,11	100,00	103.920.519
5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	943.520.000	0	943.520.000	943.520.000	0	0	0	943.520.000	926.227.528	0	0	0	926.227.528	98,17	100,00	17.292.472

TAHUN 2025

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
BAPPEDA PROVINSI JAMBI

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan		4.034.674.600	(698.953.300)	3.335.721.300	3.335.721.300	0	0	0	3.335.721.300	2.983.564.429	0	0	0	2.983.564.429	89,44	98,76	352.156.871
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.865.000	(60.865.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	108.000.000	86.640.000	194.640.000	194.640.000	0	0	0	194.640.000	194.640.000	0	0	0	194.640.000	100,00	100,00	0
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	215.394.000	(205.044.000)	10.350.000	10.350.000	0	0	0	10.350.000	10.350.000	0	0	0	10.350.000	100,00	100,00	0
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.976.570.000	(251.595.900)	1.724.974.100	1.724.974.100	0	0	0	1.724.974.100	1.683.509.783	0	0	0	1.683.509.783	97,60	97,60	41.464.317
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	375.000.000	0	375.000.000	375.000.000	0	0	0	375.000.000	265.142.781	0	0	0	265.142.781	70,70	100,00	109.857.219
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	170.820.600	(166.274.400)	4.546.200	4.546.200	0	0	0	4.546.200	4.500.000	0	0	0	4.500.000	98,98	100,00	46.200
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	106.720.000	(101.814.000)	4.906.000	4.906.000	0	0	0	4.906.000	4.906.000	0	0	0	4.906.000	100,00	100,00	0
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.021.305.000	0	1.021.305.000	1.021.305.000	0	0	0	1.021.305.000	820.515.865	0	0	0	820.515.865	80,34	100,00	200.789.135
TOTAL		35.797.320.437	(6.061.330.368)	29.735.990.069	28.867.643.953	868.346.116	0	0	29.735.990.069	26.163.518.307	862.070.400	0	0	27.025.588.707	90,89	98,03	2.710.401.362

TAHUN 2025

C. CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025				BIDANG
						Target	Realisasi Target	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	
Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.			Indek Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Jambi	Indeks	86,14	88	88	29.735.990.069	27.025.588.707	
	1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi		Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	%	80	80	80			
			Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya.	%	100	100	100			
			Presentase Keterisian Data dan Rencana dalam SIPD	%	80	80	80			
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada Bidang perekonomian dan SDA	%	98	98	98	5.216.628.000	4.615.065.661	PSDA
			Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada Bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	95	95	95	3.335.721.300	2.983.564.429	INFRA SWIL
			Persentase keselarasan RKPD dengan RENJA PD pada Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	98	98	98	1.315.274.528	1.295.709.392	PPM
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	1.471.450.616	1.315.176.489	PPEPD
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	489.315.330	485.010.820	
	2. Terwujudnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,5	82,5	83	244.910.903	238.365.794	SEKRETARIATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,6	87	93	15.792.510.444	14.340.726.929	
			Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	Nilai	92,9	93,5	94	1.870.178.948	1.751.969.193	
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)			29.735.990.069							
REALISASI ANGGRAN (Rp.)			27.025.588.707							
SILFA (SISA ANGGRAN) (Rp.)			2.710.401.362							
REALISASI KEUANGAN (%)			90,89							
REALISASI FISIK (%)			98,03							

Ringkasan Narasi Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terarah, dan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran strategis perencanaan pembangunan yang efektif, terintegrasi, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi memegang fungsi kunci sebagai motor penggerak perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tahun Anggaran 2025 menjadi periode yang penting bagi Bappeda Provinsi Jambi karena berada pada masa transisi perencanaan dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021–2026 menuju RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, yang menuntut konsistensi, adaptasi, serta ketepatan arah kebijakan perencanaan pembangunan.

Tujuan utama yang diemban Bappeda Provinsi Jambi pada Tahun 2025 adalah memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tujuan ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola perencanaan yang integratif, berbasis data, serta selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah. Capaian tujuan tersebut tercermin pada indikator utama Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Jambi, yang menunjukkan peningkatan dari data capaian awal perencanaan sebesar 86,14 menjadi 88 pada Tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi berada pada kategori baik dan terus mengalami peningkatan, sejalan dengan upaya penguatan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Bappeda Provinsi Jambi menetapkan sasaran strategis pertama, yaitu meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan akuntabel berbasis teknologi informasi. Sasaran ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan, tersusun secara konsisten dan saling terhubung satu sama lain.

Capaian sasaran tersebut diukur melalui beberapa indikator kinerja utama, Adalah Sebagai Berikut :

- 1) Pertama, Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah, yang pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 80 persen dan berhasil direalisasikan sebesar 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan.
- 2) Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya, yang ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa proses penyusunan perencanaan tahunan telah sepenuhnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, sehingga perencanaan tidak bersifat statis, tetapi adaptif dan berbasis pembelajaran (learning process).
- 3) Persentase Keterisian Data dan Rencana dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang ditargetkan sebesar 80 persen dan terealisasi 80 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen Bappeda Provinsi Jambi dalam mendukung

digitalisasi perencanaan pembangunan serta penguatan sistem informasi sebagai basis pengambilan keputusan yang akuntabel dan transparan.

Dalam mendukung sasaran strategis tersebut, Bappeda Provinsi Jambi melaksanakan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini berfokus pada peningkatan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah lintas bidang.

Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), indikator Persentase Keselarasan RKPD dengan RENJA Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 98 persen dan berhasil direalisasikan 98 persen. Program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp.5.216.628.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.615.065.661. Capaian ini menunjukkan koordinasi perencanaan yang efektif dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil), indikator keselarasan RKPD dengan RENJA Perangkat Daerah ditargetkan dan direalisasikan sebesar 95 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.335.721.300 dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.983.564.429. Capaian ini mencerminkan terjaganya konsistensi perencanaan pembangunan infrastruktur dan penataan wilayah yang mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan daerah.

Sementara itu, pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), indikator keselarasan RKPD dengan RENJA Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 98 persen dan terealisasi 98 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.315.274.528 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.295.709.392. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan telah disusun secara sinergis dan terintegrasi.

Selain program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, Bappeda Provinsi Jambi juga melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Program ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan. Indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD ditargetkan 100 persen dan terealisasi 100 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.471.450.616 dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.315.176.489. Selain itu, indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah juga mencapai 100 persen, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.489.315.330 dan realisasi anggaran sebesar Rp.485.010.820. Capaian ini menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan daerah berjalan konsisten dan terintegrasi.

Sasaran strategis kedua yang ditetapkan Bappeda Provinsi Jambi adalah terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel. Sasaran ini diwujudkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang berfokus pada penguatan tata kelola internal dan kualitas layanan publik.

Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan peningkatan dari data awal 81,5 menjadi realisasi 83, melampaui target 82,5, dengan alokasi anggaran sebesar Rp244.910.903 dan realisasi anggaran sebesar Rp.238.365.794. Peningkatan nilai AKIP ini mencerminkan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Jambi yang semakin terukur dan berorientasi hasil.

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mencapai target 87, meningkat dari data awal 93, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.792.510.444 dan realisasi anggaran sebesar Rp.14.340.726.929. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan Bappeda Provinsi Jambi dinilai baik oleh masyarakat.

Indikator lainnya, yaitu Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik, menunjukkan capaian 94, melampaui target 93,5, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.870.178.948 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.751.969.193. Hal ini mencerminkan komitmen Bappeda Provinsi Jambi dalam mewujudkan transparansi informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025 menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran strategis telah dicapai dengan baik, baik dari sisi kinerja substantif maupun pengelolaan anggaran. Total alokasi anggaran sebesar Rp.29.735.990.069 direalisasikan sebesar Rp.27.025.588.707, yang menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian ini menjadi bukti bahwa Bappeda Provinsi Jambi mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 pada Bappeda Provinsi Jambi, setelah dilakukan perubahan anggaran, total **anggaran yang tersedia** tercatat sebesar **Rp.29.735.990.069**. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dari total anggaran setelah perubahan tersebut, **realisasi anggaran** yang dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai **Rp.27.025.588.707**. Dengan demikian, terdapat **sisa anggaran (SILPA)** sebesar **Rp.2.710.401.362**. Sisa anggaran ini terutama dipengaruhi oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, optimalisasi belanja, serta beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana akibat penyesuaian kebijakan dan dinamika pelaksanaan program selama tahun berjalan.

Secara persentase, **realisasi keuangan** Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025 mencapai **90,89 persen**, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran berada pada kategori tinggi dan mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan bertanggung jawab. Capaian ini juga mengindikasikan

bahwa sebagian besar rencana belanja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi.

Sementara itu, **realisasi fisik** kegiatan mencapai **98,03 persen**, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan target fisik yang ditetapkan. Tingginya capaian realisasi fisik ini menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jambi pada Tahun 2025 berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara realisasi keuangan dan realisasi fisik menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, di mana capaian fisik kegiatan lebih tinggi dibandingkan dengan serapan anggaran. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip **value for money** dalam pengelolaan keuangan daerah, serta komitmen Bappeda Provinsi Jambi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. PENUTUP.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi. LKPJ ini menyajikan gambaran kinerja Bappeda Provinsi Jambi serta evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah diraih, baik pada tingkat program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025 dilakukan melalui proses pengumpulan dan pengolahan berbagai dokumen pendukung yang relevan, antara lain Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jambi, hasil evaluasi kinerja, serta analisis akuntabilitas kinerja. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara sistematis guna memperoleh data dan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Jambi pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar program, kegiatan, subkegiatan, serta sasaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala dan hambatan yang memerlukan perhatian serta tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Capaian kinerja yang telah diraih merupakan hasil dari kerja sama, koordinasi, dan partisipasi seluruh pihak. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang. Sementara itu, terhadap target-target kinerja yang belum tercapai, perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif serta dukungan

yang lebih optimal dari berbagai pihak guna memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, disampaikan terima kasih.

Jambi, Januari 2026.
KEPALA BAPPEDA

Ir. AGUS SUNARYO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660814 199303 1 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Penghargaan - Penghargaan.